

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang bersitegang dengan Uni Soviet dalam Perang Dingin di mana salah satu kekuatan yang dimiliki adalah senjata nuklir. Pasca Perang Dingin kepemilikan senjata nuklir oleh dua negara adidaya ini memiliki dampak terhadap negara-negara lain. Pada tahun 1991 ditandai dengan munculnya kecenderungan negara-negara lain yang berlomba-lomba untuk memiliki senjata nuklir (Sundari, 2020). Fenomena ini terjadi dikarenakan negara-negara melihat bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh dua negara yang bersitegang dalam perang dingin dapat menahan diri untuk tidak saling menyerang. Terdapat berbagai alasan negara-negara ini untuk memiliki nuklir di antaranya adalah alasan keamanan di mana nuklir menciptakan *security dilemma* di kancah percaturan internasional. Alasan lain yaitu kemampuan nuklir di mana dianggap dapat menaikkan pengaruh sebuah negara dalam politik global. Selain itu dengan memiliki senjata nuklir merupakan penyeimbang kekuatan di mana memberikan pencegahan bagi negara-negara Dunia Ketiga yang lemah untuk melindungi kepentingan vital mereka dari serangan kekuatan-kekuatan imperial (Torbat, 2020). Sehingga banyak negara-negara yang melakukan pengembangan senjata nuklir yaitu Prancis, Cina, India, Jerman, Belgia, Belanda, Italia, Turki, Israel, Korea Utara, Inggris dan Pakistan. Negara-negara di atas merupakan negara dengan status pengembang senjata nuklir aktif selain Amerika Serikat dan Rusia. Tetapi terdapat cukup banyak pula negara-negara di bawah status pengembang nuklir level pengembangan energi non-senjata.

Iran merupakan salah satu negara yang berada dalam status negara yang mengembangkan nuklir yang bertujuan untuk pengembangan energi. Iran sendiri merupakan negara yang telah mengembangkan energi nuklirnya pada tahun 1950 di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlavi. Dibuktikan melalui laporan dari *Arms Control Association* pada Februari 1970 parlemen Iran telah meratifikasi *Nonproliferation Treaty (NPT)* atau Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dan pada tahun 1974 di bawah Shah Reza Pahlavi mendirikan *Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)*. Upaya-upaya pengembangan nuklir Iran juga tidak lepas dari program bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Di mana pengembangan nuklir ini adalah salah satu bagian dari *atom for peace* yang dibentuk pada masa kepemimpinan Presiden Eisenhower dan Iran adalah satu dari beberapa negara yang ada dalam program bantuan tersebut (Karima, 2018). Dapat dilihat bahwa hubungan antara kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Iran berjalan dengan baik terutama terkait dengan pengembangan nuklir Iran.

Tetapi hubungan ini mengalami penurunan setelah Iran mengalami revolusi pada tahun 1979 di mana rezim Shah Reza Pahlavi runtuh dan terjadi pergantian pemimpin Iran menjadi Ayatullah Khomeini merupakan sosok pemimpin yang sangat kontra terhadap barat terutama Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat *Great Satan* dan sangat mendesak untuk menghilangkan pengaruh barat di Iran (Mirela ATANASIU, 2019). Pasca runtuhnya rezim Shah Reza Pahlavi, Amerika Serikat khawatir akan munculnya fundamentalisme Islam radikal atau Khomeinisme, yang akan menyebar ke negara lain setelah revolusi ini di mana akan mengubah persepsi berhubungan dengan barat. Selain itu juga terdapat beberapa rentetan kejadian yang membuat hubungan antara Iran dan Amerika Serikat semakin memburuk yaitu peristiwa penyanderaan kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran yang

menyebabkan pembekuan hubungan diplomatik antara kedua negara dan juga merusak hubungan Iran dengan negara-negara barat selain itu juga program nuklir Iran dihentikan. Pada saat itu juga Amerika Serikat memberlakukan sanksi pertama kepada Iran di mana dimuat dalam *EXECUTIVE ORDER NO. 12170 Nov. 14, 1979, 44 F.R. 65729*;

blocked all property and interests in property of the Government of Iran, its instrumentalities and controlled entities and the Central Bank of Iran which are or become subject to the jurisdiction of the United States or which are in or come within the possession or control of persons subject to the jurisdiction of the United States.

Hubungan kedua negara tidak memperlihatkan tanda-tanda membaik di mana kedua negara terus menerus melakukan tindakan-tindakan konfrontatif kepada satu sama lain. Pecahnya perang antara Iran-Irak menyebabkan Iran diberi sanksi kembali oleh Amerika Serikat yaitu pelarangan penjual senjata dan bantuan apa pun kepada Iran karena dianggap mendukung terorisme dan pengembangan senjata nuklir. Hal ini diperkuat dengan Pernyataan Biro Kontra terorisme Amerika Serikat yang mengemukakan bahwa Iran dimasukkan ke dalam daftar “negara sponsor terorisme” pada Januari 1984. Hubungan kedua negara terus-menerus dalam keadaan yang buruk. Di tahun yang sama pula pemerintah Iran menginstruksikan untuk dibukanya kembali program nuklir sehingga Iran memiliki uranium dengan jumlah banyak dan dapat menghasilkan senjata nuklir. Dengan pengembangan program nuklir Iran secara terus menerus ini dinilai telah melanggar kesepakatan NPT (Karima, 2018). Sedangkan sanksi-sanksi dan tuduhan dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lain terhadap negaranya tetap berlanjut.

Pada tahun 1997 Presiden Iran berganti menjadi Mohammed Khatami yang merupakan seorang reformis. Di bawah kepemimpinan Khatami Iran perlahan-lahan membuka dan memperbaiki kembali hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Amerika Serikat di bawah Presiden Bill Clinton juga memiliki maksud baik untuk menormalisasi hubungan dengan Iran terlepas dari beberapa sanksi yang diberlakukan. Khatami pun memperlihatkan komitmennya untuk menunda pengayaan uranium Iran. Meskipun program nuklir Iran tidak berhenti seluruhnya tetapi komitmen ini membuka banyak kesempatan baik Iran maupun komunitas internasional untuk menyelesaikan permasalahan terkait nuklir ini (Mustofa, 2020). Hubungan yang membaik antara kedua negara ini ditandai dengan diangkat kembalinya beberapa sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran pun berangsur-angsur membaik, hal ini dapat dilihat ketika kedua negara bekerja sama untuk menemukan solusi untuk pemerintahan baru Afghanistan pasca-Taliban (Tharoor, 2015). Tetapi hubungan baik kedua negara ini tidak berlangsung lama karena setelah Iran tertangkap mengirim senjata dalam jumlah yang sangat besar dan setelah peristiwa 11 September 2001, berdasarkan Teks Pidato Kenegaraan Presiden Bush tahun 2002 menempatkan Iran sebagai *Axis of Evil* bersama dengan Irak dan Korea Utara. Hubungan yang awalnya membaik menjadi memburuk seketika dan upaya-upaya memperbaiki hubungan keduanya menjadi sia-sia, kini hubungan kedua negara ini menjadi sangat terbatas.

Pada pemerintahan George W. Bush sendiri sebenarnya masalah nuklir Iran masih menjadi ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat di mana akhirnya ancaman ini mempengaruhi bagaimana politik luar negeri yang diambil oleh George W. Bush. Adanya pernyataan Bush dalam Pidato Kenegaraannya tentang Iran mempengaruhi keputusan Bush untuk mempertimbangkan melakukan

serangan militer terhadap Iran. Meskipun pada akhirnya tidak terlaksana dan digantikan dengan sepenuhnya terlibat hubungan diplomatik dengan Iran meskipun pemberian sanksi ekonomi kepada Iran dilakukan dan pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang terlibat melakukan kerja sama dengan Iran. (Plesch & Butcher, 2007). Pada pemerintah George W. Bush dapat dilihat bahwa hubungan Iran dan Amerika Serikat belum bisa dikatakan baik tetapi terdapat upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan dapat dilihat dengan komitmen keterlibatan Amerika Serikat dalam membangun hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Di masa pemerintahan selanjutnya yaitu Presiden Barack Obama tetap melihat program pengembangan nuklir Iran merupakan ancaman. Pada masa pemerintahan Obama sanksi-sanksi ekonomi untuk menekan Iran tetap diterapkan tetapi di saat yang bersamaan juga menawarkan Iran serangkaian upaya untuk membangun hubungan diplomatik dengan harapan Iran dapat menghentikan ambisinya atas senjata nuklir. (Jahanbegloo, 2009) Disisi lain Hassan Rouhani memiliki keinginan untuk mengakhiri isolasi dan sanksi yang diberlakukan kepada Iran sehingga pada akhirnya kedua pemimpin dari Amerika Serikat dan Iran bernegosiasi. Pendekatan yang dilakukan Obama kepada Iran dengan mengupayakan cara-cara yang lebih konstruktif. Upaya ini berhasil dan dapat dilihat dari berhasilnya Perjanjian Sementara menurut *Arms Control Association* yang ditandatangani pada November 2013 usai negosiasi yang panjang. Perjanjian ini dikenal dengan *Joint Plan of Action* di mana ditandatangani oleh Iran dan negara P5+1 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Uni Eropa. Perjanjian ini menyerukan Iran agar menghentikan program nuklirnya dalam waktu singkat sebagai imbalannya akan dicabut beberapa sanksi ekonomi dengan maksud agar Iran juga bersedia untuk terus bekerja dalam kesepakatan jangka panjang. Setelah menunjukkan komitmennya dan negosiasi berkelanjutan dilakukan pada

2015 disetujui *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) oleh negara-negara yang sebelumnya juga menandatangani kesepakatan sementara. JCPOA adalah perjanjian nuklir yang membatasi nuklir Iran di mana Iran harus membatasi pengembangan nuklirnya dalam beberapa cara. Dengan disepakatinya JCPOA maka sanksi-sanksi ekonomi yang ditunjukkan terhadap Iran diangkat sementara sehingga dapat terlibat kembali dalam perdagangan internasional dan juga berdampak pada membaiknya hubungan bilateral Iran dengan negara-negara P5+1.

Pada masa pemerintahan Donald Trump menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Presiden sebelumnya Barack Obama dalam mencapai kepentingan nasionalnya yaitu dari pendekatan melalui dialog pada masa pemerintahan sebelumnya menjadi konfrontatif di pemerintahan Donald Trump. Hal ini sebenarnya dapat dilihat dari kampanye Donald Trump yang akan melakukan pendekatan berbeda terhadap kawasan Timur Tengah dan setelah terpilih Trump memenuhi janjinya dengan meningkatkan hubungan dengan Israel dan Arab Saudi di mana merupakan musuh regional Iran dan menerapkan isolasi terhadap Iran. Selain itu juga pada masa kampanye Donald Trump mengeluarkan pernyataan berupa *the nuclear pact is a disaster and the worst deal ever negotiated it could lead to a nuclear holocaust* (Paramasatya & Wiranto, 2019). Janji kampanye Donald Trump pun dipenuhi ketika terpilih menjadi Presiden Amerika di mana Trump keluar secara sepihak atau menarik diri dari kesepakatan program nuklir Iran yaitu *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada 8 Mei 2018. Perlu digarisbawahi bahwa Iran adalah fokus utama dari pemerintahan Donald Trump yang mana disebutkan *The 2017 National Security Strategy* yang kerap kali menyebutkan Iran sebagai daftar prioritas utama Amerika Serikat dalam mencegah dominasi kekuatan yang bertentangan dengan Amerika Serikat (Thompson, 2018).

Dapat dilihat bahwa pandangan Presiden Donald Trump terhadap Iran ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambilnya terhadap Iran. Hingga pada akhirnya setelah menarik diri dari JCPOA, Presiden Trump langsung menerapkan kebijakan *Maximum Pressure* terhadap Iran di mana kebijakan ini sangat menekan Iran. Kebijakan *Maximum Pressure* adalah kebijakan yang diberlakukan Donald Trump di mana kebijakan ini meliputi pemberlakuan sanksi ekonomi dan tekanan politik yang bersifat memaksa dan mengisolasi Iran di mana upaya-upaya ini ditunjukkan agar Iran dapat menerima persyaratan untuk kesepakatan baru dalam cakupan masalah yang lebih luas. (Barzegar, 2020)

Kebijakan *Maximum pressure* ini diterapkan karena Trump menilai bahwa JCPOA sebagai "kesepakatan sepihak" dan bahkan "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan". Sehingga Donald Trump keluar dari perjanjian dan menerapkan kebijakan ini. Donald Trump mengancam akan menjatuhkan *the toughest ever sanctions* terhadap Iran jika tidak memenuhi beberapa tuntutan AS dalam periode waktu yang ditentukan (Rahim, 2019). Pemberlakuan dari kebijakan *Maximum pressure* ini diberlakukan pada tahun 2018 di mana sanksi diberlakukan kembali dan ditingkatkan pada sektor keuangan, pengiriman, dan energi Iran untuk memaksa Iran "mengubah perilaku destruktifnya" dan mematuhi upaya Amerika Serikat untuk menegosiasikan ulang JCPOA (Davari, 2020). Kebijakan *maximum pressure* ini juga ditujukan untuk melindungi keamanan negara sekutunya di Timur Tengah yaitu Arab Saudi dan Israel. Kedua negara ini yaitu Israel dan Arab Saudi memandang Iran dan nuklirnya sebagai ancaman hal ini dikarenakan Iran dan juga kelompok-kelompok militan yang didukungnya kerap kali mengancam keamanan Israel maupun Arab Saudi. Ancaman dari Iran ini dapat dilihat ketika Iran yang memberikan senjata kepada Hezbollah yang merupakan salah satu kelompok militan yang

didukung oleh Iran. Senjata digunakan untuk menargetkan Israel dan Hezbollah telah menembakkan ribuan roket ke Israel (Military Threats to Israel: Iran, n.d.). Selain itu juga Iran dan Houthi yang merupakan kelompok militan lain yang di dukung, sering kali menargetkan fasilitas-fasilitas vital dan kota-kota Arab Saudi. Houthi melakukan serangan rudal baik di kota Riyadh, Jeddah, Najran, Jizan, Khamis Mushait dan Yanbu yang memakan korban (Primer, 2019). Serangan lain yang dilakukan adalah menargetkan Abqaiq dan Khurais yang merupakan dua fasilitas Aramco pada 14 September 2019 (Brumfiel, 2019). Abqaiq yang merupakan fasilitas pengolahan minyak terbesar dan Khurais merupakan ladang minyak Arab Saudi. Maka dari itu kedua negara sekutu ini memberi dukungan terhadap Amerika Serikat ketika menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan sanksi-sanksi dalam kebijakan *maximum pressure*.

Adapun kebijakan *Maximum pressure* diberlakukan secara bertahap dan terus-menerus oleh Amerika Serikat terhadap Iran yaitu dengan pemberian sanksi-sanksi. Penerapan kebijakan *Maximum pressure* ditandai dengan diberlakukannya sanksi terhadap Iran setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan JCPOA di mana sanksi ini tertera dalam *Executive order 13846* yang di terbitkan pada 6 Agustus 2018 yang mana berisi di antaranya sanksi atas memblokir pembelian uang kertas atau logam mulia Amerika Serikat oleh pemerintah Iran, sanksi pembayaran sektor otomotif, sanksi atas mata uang Iran, sanksi atas pembajakan barang untuk rakyat Iran, transfer barang atau teknologi ke Iran, larangan masuk ke wilayah Amerika Serikat, dsb. Pada dasarnya Amerika Serikat telah memberlakukan kebijakan yang menekan Iran dimasa-masa pemerintahan sebelumnya sejak adanya sanksi pertama yang dijatuhkan kepada Iran. Di mana tujuannya adalah untuk menekan Iran agar menghentikan program nuklir dan hegemoninya. Tetapi pada pemerintahan Donald Trump ini, tekanan yang diberikan

kepada Iran merupakan yang terparah sepanjang pemerintahan sebelumnya dikarenakan sanksi hampir mengenai seluruh bidang-bidang strategis Iran dan jenis dari sanksinya pun sangat beragam. Selain itu juga yang membedakan kebijakan *maximum pressure* yang di berlakukan pada masa pemerintahan Donald Trump dengan kebijakan pemerintahan sebelum-sebelumnya adalah diterapkannya *secondary sanctions* (Kroenig, 2018). Di mana *secondary sanctions* ini memungkinkan pemerintahan Trump untuk mengancam perusahaan bisnis asing dan perusahaan industri untuk memutuskan hubungan bisnis dengan Iran (Nuruzzaman, 2020). Sehingga pada akhirnya perusahaan asing ini terpaksa untuk memilih antara Iran atau Amerika Serikat untuk transaksi bisnis dan keuangan, dengan ancaman penolakan akses ke pasar keuangan Amerika Serikat bila memilih untuk bertransaksi dengan Iran.

Penelitian terdahulu (Saragih, Lestari, & Muis, 2020) dalam sebuah jurnal yang berjudul “Posisi Republik Islam Iran Dalam Program Nuklir Dalam Perspektif Amerika Serikat” menganalisis posisi Iran dalam perspektif Amerika Serikat menggunakan konsep kepentingan nasional di mana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri *maximum pressure* yang diberlakukan Donald Trump bertujuan untuk menekan Iran agar melakukan negosiasi dengan kesepakatan nuklir baru. Selain itu dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penerapan sanksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan *maximum pressure* adalah untuk mengubah tingkah laku Iran. Sedangkan dalam penelitian lain yang ditulis oleh (Sundari, 2020) dalam bentuk jurnal berjudul “Strategi Amerika Serikat dalam Menekan Pengembangan Nuklir Iran” menggunakan konsep *deterrence* dalam menganalisis penelitiannya menjelaskan bahwa kasus Iran yang berlanjut sampai saat ini tidak mampu diselesaikan kecuali dengan menyamakan persepsi politik dan kebijakan

Amerika Serikat di mana Amerika Serikat selalu menolak informasi terkait dengan aktivitas nuklir Iran yang dikarenakan persepsi dan kebijakan Iran yang tidak searah dengan Amerika Serikat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori politik luar negeri untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi penerapan kebijakan *maximum pressure* Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Amerika Serikat menerapkan kebijakan *Maximum Pressure* terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran pada masa pemerintahan Donald Trump?”**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka akan menggunakan teori politik luar negeri dan teori sekuritisasi.

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan arah dari kebijakan suatu negara di mana bertujuan untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Menurut (Holsti, 1987) Politik luar negeri adalah bagian dari kebijakan nasional sebuah negara yang mana memiliki tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut di dalam lingkup eksternal yaitu dunia internasional di mana meliputi komponen antara lain orientasi, peranan, tujuan dan juga tindakan. Orientasi dari politik luar negeri diartikan sebagai suatu sikap dan komitmen yang mana bersifat umum terhadap lingkungan eksternalnya, strategi fundamental bagi pencapaian dari tujuan domestik dan eksternal serta aspirasi untuk mengatasi berbagai ancaman yang ada. Sehingga orientasi politik luar negeri sebuah negara diekspresikan oleh tingkat

keterlibatan negara tersebut di dalam isu-isu internasional yang dinyatakan dalam rangkaian keputusan.

Menurut (Holsti, 1987) dalam bukunya berjudul *International Politics: Framework for Analysis* memaparkan komponen peran diasosiasikan dengan keterlibatan aktor negara dalam percaturan internasional dalam skala regional maupun global yang mana keterlibatan suatu negara tersebut di dalam forum akan mempengaruhi keputusan agar dapat sesuai dengan komitmen dan aturan negaranya. Dalam bukunya dijelaskan pula bahwa negara sebagai unit politik di mana memiliki kebutuhan dan tujuan yang dapat dicapai dengan mempengaruhi perilaku negara lain di mana tujuan dalam politik luar negeri adalah rangkaian kepentingan dan nilai-nilai kolektif yang berkaitan dengan perilaku negara lain. Selain itu komponen tindakan politik luar negeri diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan pemerintahan yang berkuasa kepada aktor hubungan internasional lainnya yang bertujuan mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peranan nasional dan mencapai serta mempertahankan tujuan dari politik luar negerinya. Sehingga politik luar negeri setiap negara akan berbeda dengan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki kebijakan politik luar negerinya sendiri.

Menurut (Plano & Olton, 1988) dalam bukunya berjudul “The International Relations Dictionary” yang mengartikan kebijakan luar negeri sebagai

A strategy or planned course of action developed by the decisionmakers of a state vis-a-vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest.

Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi atau tindakan terencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain atau entitas internasional, di mana ditujukan untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu yang ditentukan dalam istilah kepentingan nasional. Sehingga kepentingan nasional menjadi hal yang sangat vital dalam kebijakan luar negeri. Suatu kebijakan luar negeri tertentu yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dari masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu negara pada waktu tertentu ditentukan oleh siapa yang berkuasa saat itu.

Kebijakan luar negeri *Maximum Pressure* merupakan kebijakan yang diberlakukan pada era pemerintahan Donald Trump. Kebijakan *Maximum Pressure* ini merupakan strategi yang diambil Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang memimpin di mana kebijakan ini ditujukan terhadap penghentian program nuklir Iran. Program nuklir Iran sendiri sudah menjadi ancaman bahkan jauh sebelum Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat karena Amerika khawatir nuklir Iran akan dikembangkan menjadi senjata nuklir di mana nantinya akan menjadi sumber ketidakstabilan dan ketidakamanan kawasan Timur Tengah dan juga dapat mengancam kepentingan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Sejak kampanye Donald Trump sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat, Trump sudah mengisyaratkan akan melakukan pendekatan yang berbeda di Timur Tengah hal ini dapat dilihat dari bagaimana setelah terpilihnya sebagai Presiden, Trump berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan sekutu tradisional Kawasan yaitu Israel dan Arab Saudi dan juga melakukan tekanan-tekanan melalui kebijakan *maximum pressure* terhadap Iran. Israel merupakan sekutu terpenting dari Amerika Serikat maka membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dapat memberikan masalah keamanan yang sangat besar bagi Israel. Selain itu hubungan Amerika Serikat dengan Israel selalu menjadi kepentingan vital bagi kepentingan keamanan strategis Amerika Serikat (Zanotti, 2018). Arab Saudi juga memiliki arti penting bagi Amerika Serikat. Di mana kedua negara sekutu ini memandang Iran

sebagai musuh regionalnya yang mengancam keamanan negaranya. Sehingga di bawah pemerintahan Donald Trump banyak melakukan upaya-upaya guna menghentikan program pengembangan nuklir Iran ini dan mengurangi ancaman terhadap sekutu tradisionalnya. Di antaranya adalah dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran yaitu *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan juga penerapan kebijakan *Maximum Pressure* pada 2018 oleh Amerika Serikat terhadap Iran (Pillar, 2020). Di mana kebijakan ini berisi sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan yang bertujuan untuk menekan Iran.

Teori Sekuritisasi

Teori Sekuritisasi adalah salah satu jenis dari teori keamanan yang lebih berkembang dari teori tradisional. Dalam bukunya berjudul *Security: A new Framework of Analysis*, Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mengartikan Sekuritisasi sebagai pengidentifikasian isu tertentu yang dijadikan agenda keamanan. Di mana aktor-aktor yang berperan dalam proses sekuritisasi ini secara umum didominasi oleh negara. Proses ini berhubungan dengan ancaman yaitu dalam sektor militer, ekonomi, sosial dan lingkungan (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Teori ini menegaskan jika masalah yang dasarnya tidak mengancam dengan melabeli maupun menyebut hal tersebut sebagai masalah “keamanan” maka berubah menjadi masalah keamanan serius (McGlinchey, Walters, & Scheinflug, 2017, hal. 143). Sekuritisasi ini merupakan cara memandang atau memperlakukan suatu isu yang berkembang menjadi sebuah bahaya yang sangat serius disertai dengan ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada. Sehingga yang pada awalnya sebuah isu yang berkembang dipandang atau dilabeli bukan sebagai masalah keamanan tetapi dengan melabeli isu tersebut sebagai masalah keamanan maka cara

memandang isu tersebut menjadi masalah keamanan yang serius dan membutuhkan penanganan yang sangat serius.

Keamanan sekutu Amerika Serikat menjadi hal yang krusial pada masa pemerintahan Trump. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Trump yang selama kampanyenya berjanji untuk melakukan peningkatan hubungan dengan sekutunya di Timur Tengah yaitu Israel dan Arab Saudi ini mendorong Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump menaruh keamanan sekutunya sebagai hal yang penting. Sehingga ancaman-ancaman yang datang ke negara sekutu merupakan ancaman yang sangat berarti. Maka dari itu kebijakan *maximum pressure* diberlakukan untuk mengurangi ancaman-ancaman yang datang dari Iran. Di mana baik Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi melihat Iran, program pengembangan nuklirnya maupun kelompok militan yang didukungnya sebagai ancaman bagi keamanan sekutunya. Jika dibandingkan pada pemerintahan sebelumnya yaitu pada masa Obama, nuklir Iran pun tetap dianggap ancaman tetapi Obama melakukan pendekatan dengan membuat kesepakatan yaitu JCPOA di mana fokusnya adalah untuk memperbaiki hubungan dengan Iran. Tetapi tindakan Obama ini mendapat kritikan tajam dari Israel khususnya. Sehingga program pengembangan nuklir Iran sudah bukan merupakan ancaman yang berarti bagi sekutunya di masa pemerintahan Obama. Tetapi hal ini berubah pada masa pemerintahan Trump yang secara lantang dan terus-menerus mengemukakan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklirnya. Dengan menilai kesepakatan JCPOA merupakan kesepakatan yang merugikan bagi Amerika Serikat dan tidak dapat menghentikan pengembangan nuklir Iran. Di mana hal ini pun mengubah arah kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Trump terhadap Iran maupun sekutunya di Timur Tengah.

Dapat dilihat bagaimana Trump yang membingkai dan melabeli nuklir Iran dan kelompok militan yang didukungnya sebagai ancaman bagi keamanan sekutunya sangat jelas sehingga menempatkan keamanan sekutu sebagai salah satu hal penting dalam pemerintahannya. Maka dari itu cara yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump terkait dengan ancaman dari Iran pun sangat serius. Hal ini dikarenakan keamanan sekutu ini yang awalnya atau pada pemerintahan sebelumnya merupakan isu yang semestinya merupakan suatu permasalahan yang tergolong biasa dan semestinya dibutuhkan pengamanan wajar yang tidak perlu tindakan represif. Tetapi dengan menjadikan isu keamanan sekutu hal yang penting di pemerintahan Trump maka hal-hal yang mengancam keamanan sekutu yaitu nuklir Iran dan kelompok militan yang didukungnya adalah ancaman yang sangat serius bagi Israel dan Arab Saudi yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya. Sehingga Amerika Serikat melakukan beberapa cara untuk melemahkan Iran agar tidak menjadi ancaman bagi sekutunya di Timur Tengah yaitu dengan memberikan sanksi-sanksi ekonomi dalam kebijakan *maximum pressure* yang menargetkan banyak sektor-sektor vital Iran dan juga memberi sanksi terhadap semua entitas yang bekerja sama dengan Iran dan kelompok militan yang didukungnya.

Kebijakan *maximum pressure* ini diambil oleh pemerintahan Donald Trump untuk melindungi keamanan sekutunya di Timur Tengah yaitu Israel dan Arab Saudi. Nuklir Iran merupakan ancaman keamanan bagi Israel dan Arab Saudi di mana kedua negara ini memandang Iran sebagai musuh regionalnya. Maka dari itu peningkatan pengaruh Iran di Timur Tengah terkait dengan pengembangan nuklir yang dicurigai akan dikembangkan menjadi senjata nuklir merupakan ancaman bagi keamanan Israel dan Arab Saudi yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Ancaman keamanan akibat pengembangan nuklir

ini juga karena senjata nuklir yang dapat mengubah negara pemilik menjadi kekuatan utama di tingkat regional dan global. Amerika Serikat percaya bahwa jika beberapa negara Islam radikal memperoleh senjata nuklir artinya sama saja dengan tidak hanya mengizinkan kelompok teroris untuk mendapatkan bom atom tetapi juga untuk menunjukkan kelonggaran terhadap teroris yang disponsori negara yang dapat mempersenjatai organisasi teroris dengan bom atom (Joobani & Daheshvar, 2020). Tentu dari pernyataan ini negara yang dimaksud salah adalah Iran. Hal ini dikuatkan dari pernyataan-pernyataan Amerika Serikat yang menunjuk Iran sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1984 dan diperkuat juga dari Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2018 menegur Iran yang membantu teroris untuk tahun kedua berturut-turut (Wirawan, 2018). Amerika Serikat melihat kelompok militan Shia sebagai ancaman nyata dan dengan memperjelas hubungan Iran dan kelompok militan seperti Hezbollah maka Amerika Serikat meyakinkan sekutunya untuk memaksimalkan koordinasi untuk menjatuhkan dan menerapkan sanksi pada Teheran dan mengisolasi Iran (Joobani & Daheshvar, 2020). Dapat dilihat bahwa Amerika Serikat khawatir apabila Iran terus menerus melakukan pengayaan uranium maka status nuklir Iran akan berubah menjadi senjata nuklir dan digunakan untuk mempersenjatai kelompok-kelompok terorisme untuk melawan sekutunya di Timur Tengah. Maka dari itu sanksi-sanksi yang diterapkan dalam kebijakan *maximum pressure* ini banyak yang berkaitan dengan nuklir Iran. Di mana tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ancaman dari Iran dan melindungi keamanan sekutunya di Timur Tengah.

Kebijakan *maximum pressure* yang berisi sanksi-sanksi ekonomi ini ditujukan untuk melemahkan dan mengontrol Iran agar tidak menjadi ancaman bagi negara sekutunya seperti Israel dan Arab Saudi. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa ini sektor ekonomi paling

efektif untuk melemahkan sebuah negara terutama Iran karena mengekang sumber daya ekonomi Iran akan memaksa Iran untuk membatasi aktivitas regionalnya (Pillar, 2020). Pembatasan regional dimulai dari menghentikan pengembangan nuklir Iran terlebih dahulu. Sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk memicu krisis ekonomi yang akan memaksa Iran yang terancam bangkrut untuk melakukan negosiasi ulang yang akan lebih menguntungkan Amerika Serikat sehingga akibat dari krisis dan kemiskinan rakyat Iran menyebabkan "perubahan rezim" (Krzyzanowski, 2020).

Dengan Amerika Serikat yang melindungi keamanan negara sekutunya di Timur Tengah dari ancaman-ancaman yang datang dari Iran dan kelompok militan Shia yang didukungnya yaitu dengan memberikan sanksi-sanksi ekonomi terhadap keduanya. Ini adalah upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengurangi ancaman Iran dan kelompok militan Shia yang mengancam keamanan Israel dan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan sanksi dalam kebijakan *maximum pressure* ini, Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa dan negara sekutunya. Hal ini dikarenakan kedua negara sekutu memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat. Di mana ketika Israel dan Arab Saudi terancam oleh Iran serta kelompok militan Shia maka nilai-nilai yang dianggap strategis Amerika Serikat di negara-negara sekutu pun terancam.

D. Hipotesa

Amerika Serikat menerapkan kebijakan *Maximum Pressure* terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran pada masa pemerintahan Donald Trump di dorong oleh dua faktor utama. Pertama adalah untuk menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat karena sekutu tradisional yaitu Israel dan Arab Saudi memiliki arti penting bagi Amerika Serikat. Kedua adalah untuk

menjaga relasi dengan sekutu tradisionalnya di Timur Tengah yaitu dengan menjaga keamanan.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan *Maximum Pressure* Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran pada Masa Pemerintahan Donald Trump” ini penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Mengetahui mengapa Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan *Maximum Pressure* terhadap program pengembangan nuklir Iran.
2. Mengetahui apa saja kepentingan yang ingin dicapai oleh Presiden Donald Trump melalui penerapan kebijakan *Maximum Pressure* ini.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini akan berfokus pada era di mana Donald Trump berkampanye sebagai kandidat presiden Amerika Serikat hingga masa Donald Trump menjabat sebagai presiden terpilih Amerika Serikat. Fokus rentang waktu penelitian ini adalah tahun 2017 ketika Donald Trump secara resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat hingga akhir masa jabatan presiden Donald Trump. Adapun rentang waktu diberikan dikarenakan kebijakan Amerika Serikat pada masa Presiden Donald Trump berbeda dari pemerintahan sebelumnya terhadap program pengembangan nuklir Iran di mana ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat menerapkan *Maximum Pressure* terhadap Iran maka dari itu sedikit akan dibahas juga kebijakan pemerintahan sebelum Trump terkait dengan nuklir Iran. Pada penelitian ini penggunaan data atau sumber diluar jangkauan penelitian tidak dapat dipungkiri. Tetapi,

sumber atau data ini akan digunakan hanya akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Arikunto, 2006) dalam bukunya berjudul “Metode Penelitian: Suatu pendekatan Praktik” metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dititikberatkan terhadap analisa dari data-data yang bersifat non angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pengumpulan data sekunder atau menggunakan studi pustaka yang mana diperoleh dari mengumpulkan informasi dan data-data dari buku, jurnal ilmiah, laporan, dokumen, majalah, internet dan berita dalam rangka menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian. Menurut Braun & Clarke yang dikutip dari (Perwita, 2020) menyatakan bahwa metode ini merupakan alat yang efektif untuk menghubungkan pola-pola dalam fenomena tertentu dan juga memahami sejauh mana fenomena tersebut terjadi dalam perspektif penulis. Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif di mana bertujuan untuk menjelaskan sebab mengapa suatu fenomena terjadi.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Pada bab ini akan memuat penjabaran latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori dan konsep, hipotesa, tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab II dalam penelitian ini akan membahas tentang dinamika hubungan Amerika Serikat-Iran dan kebijakan *Maximum Pressure* di bawah kepemimpinan Trump.

BAB III

Bab III dalam bab penelitian ini adalah bagian pembuktian hipotesa di mana akan menjabarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakan *Maximum Pressure* terhadap program pengembangan nuklir Iran di masa Presiden Donald Trump.

BAB IV

Bab IV dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan. Pada bab ini, akan dibahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan analisis data yang terdapat dalam seluruh penelitian ini.